

PERAWAN DI KAMPUNG ORANG YANG SAKIT INGATAN

Burhanudin DR

Arsiparis Kantor Arsip Daerah Provinsi DIY

I

Berbicara arsip dalam konteks Indonesia adalah berbicara tentang obyek yang vital tetapi tidak banyak diperhatikan. Ibarat organ tubuh yang cukup vital tetapi tidak kelihatan, sehingga terkena gatal-gatal atau panu. Orang akan kebingungan ketika akan menggunakan tetapi mengalami disfungsi. Demikian sebuah gambaran yang mungkin tidak tepat untuk menggambarkan kondisi dunia kearsipan Indonesia.

Sebuah pertanyaan yang layak untuk selalu dimunculkan adalah mengapa arsip di Indonesia tidak pernah diposisikan secara proporsional ? Bagaimanakah kaitannya dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan upaya menyiapkan SDM kearsipan lewat jalur pendidikan ?

Tulisan ini hanya merupakan sebuah kegelisahan tentang kearsipan di Indonesia. Uraian di dalamnya tidak secara komprehensif dan detail membahas permasalahan. Sebagai sebuah pengantar diharapkan tulisan ini mampu menjadi sebuah tantangan bagi para pemerhati dan praktisi di bidang kearsipan untuk melahirkan gagasan yang kreatif dan inovatif.

II

Secara umum perlu diketahui terlebih dahulu kenapa arsip memiliki fungsi penting bagi peradaban modern ? Hal ini untuk memberikan ketegasan bahwa selayaknya bukan hanya ‘orang arsip’ yang harus berkata **“arsip itu penting”**. Beberapa poin yang menunjukkan arti penting arsip tersebut antara lain :

1. Kehidupan modern tidak bisa lepas dari arsip, sejak manusia lahir hingga mati membutuhkan arsip;
2. Arsip menjadi pilar dalam pelaksanaan manajemen modern;
3. Arsip merupakan bukti otentik;
4. Menjadi catatan dari apa yang pernah dilakukan oleh seseorang ataupun sebuah institusi.

Dari keseluruhan arti penting tersebut, pada prinsipnya arsip menentukan status dan hak dari seseorang atau sebuah lembaga.

III

Dilihat kacamata kearsipan dapat dikatakan bahwa Indonesia belum bisa dikatakan sebagai sebuah bangsa yang modern. Arsip di Indonesia selalu dikaitkan dengan bukti masa lalu. Bahkan sebagai suatu ‘benda antik’, bukan sebagai salah satu sumber informasi.

Bukti dari hal tersebut adalah belum adanya perhatian yang proporsional terhadap bidang kearsipan. Beberapa indicator dari hal tersebut antara lain :

1. *Policy* yang ada cenderung tidak berpihak pada bidang kearsipan;
2. Secara teknis pengelolaan arsip cenderung kacau, bahkan sulit mencari lembaga yang professional dalam pengelolaan arsip
3. Banyak arsip yang bernilai guna penting hilang;
4. Banyak terjadi dokumen ganda tentang satu urusan.

Kondisi tersebut mengakibatkan kearsipan menjadi bidang yang tidak populer dan tidak menarik. Tidak banyak orang yang tertarik untuk menekuni bidang ini. Lebih dari itu bidang kearsipan dicitrakan sebagai pekerjaan yang tidak bergengsi bahkan berstatus kelas dua. Tidak sedikit mereka yang ditempatkan di bidang kearsipan dianggap orang yang bermasalah atau tidak berprestasi.

Citra seperti itu muncul karena kultur dan kondisi ‘keterbelakangan’. Kultur kemiskinan seperti kebiasaan menghabiskan waktu untuk ngobrol cenderung tidak menghargai hal-hal yang bersifat dokumentatif. Demikian halnya dengan keterbelakangan, baik pendidikan maupun ekonomi, menyebabkan orientasi hanya tertuju pada bidang-bidang yang secara langsung memberikan keuntungan secara material.

IV

Kondisi di Indonesia seperti diuraikan terdahulu apabila dipetakan secara positif sebenarnya dapat dikatakan bidang kearsipan memiliki peluang dan tantangan yang sangat luas untuk lebih dikembangkan. Sebagai gambaran, tahun 2005 pemerintah memberikan kuota 20.000 tunjangan arsiparis tetapi baru terpenuhi 6.000 orang pejabat fungsional arsiparis. Artinya masih sekitar 14.000 kursi yang belum terisi. Hal ini belum

termasuk perusahaan dan lembaga swasta. Apabila hal itu diperhitungkan maka kebutuhan akan tenaga kearsipan jauh di atas angka 14.000.

Permasalahan yang menghambat terpenuhinya kebutuhan tenaga kearsipan adalah terutama karena **citra** dan **ketidakpopuleran istilah arsip**. Di sisi lain arsip dianggap bagian terkecil dari ilmu administrasi atau manajemen perkantoran.

Permasalahan lain adalah hal-hal yang muncul dari policy, baik secara makro maupun mikro, serta perilaku birokrasi di Indonesia yang cenderung korup dan feodalistik. Bagaimanapun kultur yang demikian memiliki kecenderungan untuk sedapat-dapatnya tidak meninggalkan jejak. Sementara itu feodalistik cenderung memarginalkan bidang kearsipan.

Mengutip kata Sartono Kartodirjo “Barangsiapa lupa sama sekali akan masa lampainya dapat diibaratkan seperti mereka yang sakit jiwa”. Apabila arsip dilihat dari dimensi masa lampau maka mengabaikan arsip adalah mengabaikan masa lampau. Hal ini berbahaya bagi upaya pencarian identitas kebangsaan.

Dalam beberapa literature disebutkan bahwa arsip adalah pusat ingatan. Di Indonesia sampai saat sulit untuk menemukan lembaga yang arsipnya tertata secara sistemik. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pusat ingatan bangsa Indonesia banyak yang dalam keadaan kacau. Artinya apabila dilihat dari kaca mata kearsipan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kacau pusat ingatannya.

Oleh karena itu dapat diibaratkan ada seorang gadis cantik, lugu, dan masih suci hama bernama Karsipah tinggal di kampung yang dihuni orang-orang yang sakit ingatan. Maka tak seorangpun tertarik dengan Karsipah sebelum dia mengetahui kecantikan dan menikmati belaiannya.

V

Berkaitan dengan peningkatan SDM Kearsipan, baik dalam artian penyediaan Tenaga trampil maupun peningkatan kualitas praktisi di bidang kearsipan masih jauh dari kondisi ideal. Pembukaan Program D3 Kearsipan cukup memberikan harapan. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi hambatan bagi upaya mencapai kualitas yang ideal baik yang menyangkut kurikulum, ketidakjelasan bidang kearsipan sebagai suatu ilmu, pengajar yang didominasi praktisi, maupun ketersediaan sarana yang memadai. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah rekrutmen mahasiswa. Tidak dipungkiri bahwa kecenderungan

terbesar calon mahasiswa memilih program kearsipan adalah bukan pilihan pertama. Bahkan sebagai alternative setelah beberapa kali mengalami kegagalan masuk perguruan tinggi. Artinya dapat diasumsikan bahwa sebagian besar mahasiswa kearsipan berangkat dari keterpaksaan menuju ketidakjelasan tujuan. Oleh karena itu harus ada pembenahan yang komprehensif serta didukung *policy* yang membuka peluang bagi upaya perbaikan bidang kearsipan. Dalam hal ini Arsip Nasional RI (ANRI) menjadi lembaga kunci untuk lebih mengupayakan pemasyarakatan arsip. Pembukaan Program D3 kearsipan atau bahkan tingkat Strata I apabila tidak didukung ‘penyadaran’ akan arti penting arsip maka pendidikan di bidang kearsipan hanya akan menciptakan ‘pengangguran’ baru yang sia-sia.

VI

Arsip merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat modern. Secara riil kebutuhan tenaga kearsipan di Indonesia masih tinggi, tetapi karena pemahaman tentang arsip yang masih sangat terbatas menjadikan kesempatan bagi tenaga kearsipan menjadi terbatas. Pendidikan kearsipan sebagai upaya penyadaran perlu digalakkan, baik secara formal maupun kedinasan. Proses pendidikan di bidang kearsipan perlu didukung system, kurikulum, sarana, serta tenaga akademisi yang memadai. Selain itu dibutuhkan juga *policy* yang memihak pada bidang kearsipan. (Dusun, 19 Mei 2007)